

ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER 2-2023



ANALISIS **INDIKATOR MAKRO** **SOSIAL PROVINSI** **SULAWESI SELATAN** **SEMESTER 2-2023**



<https://sulsel.bps.go.id>



**ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER 2-2023**

Volume 5, Nomor 1, 2024

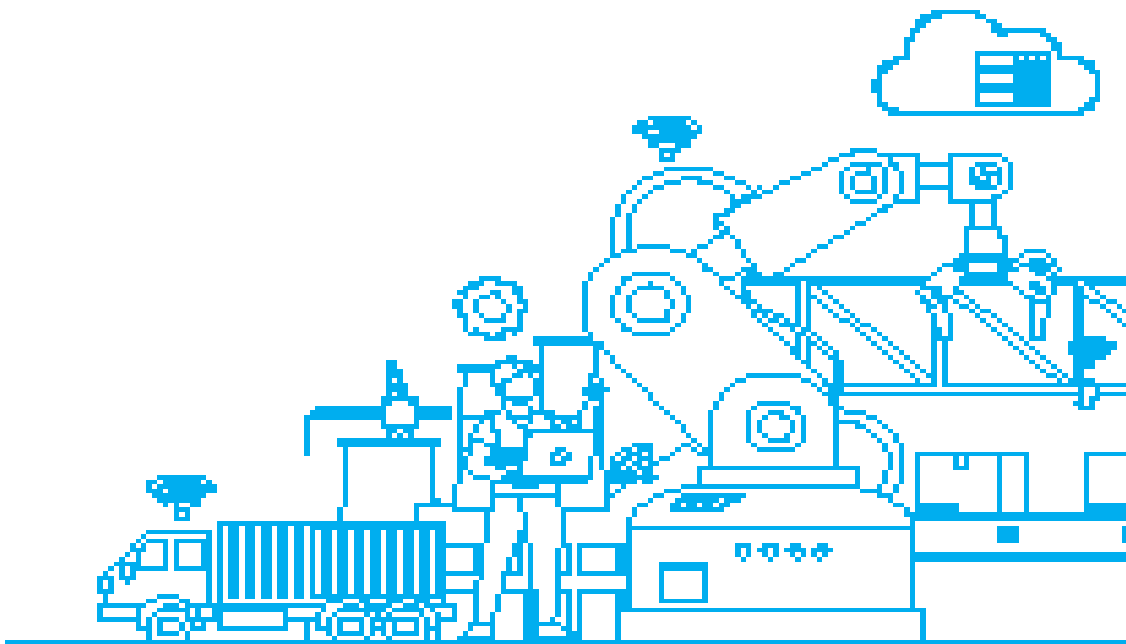
Nomor Publikasi : 73000.24010
Katalog : 4101041.73
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi+35 halaman

Penyusun Naskah/Penyunting/Pembuat Kover :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan



TIM PENYUSUN

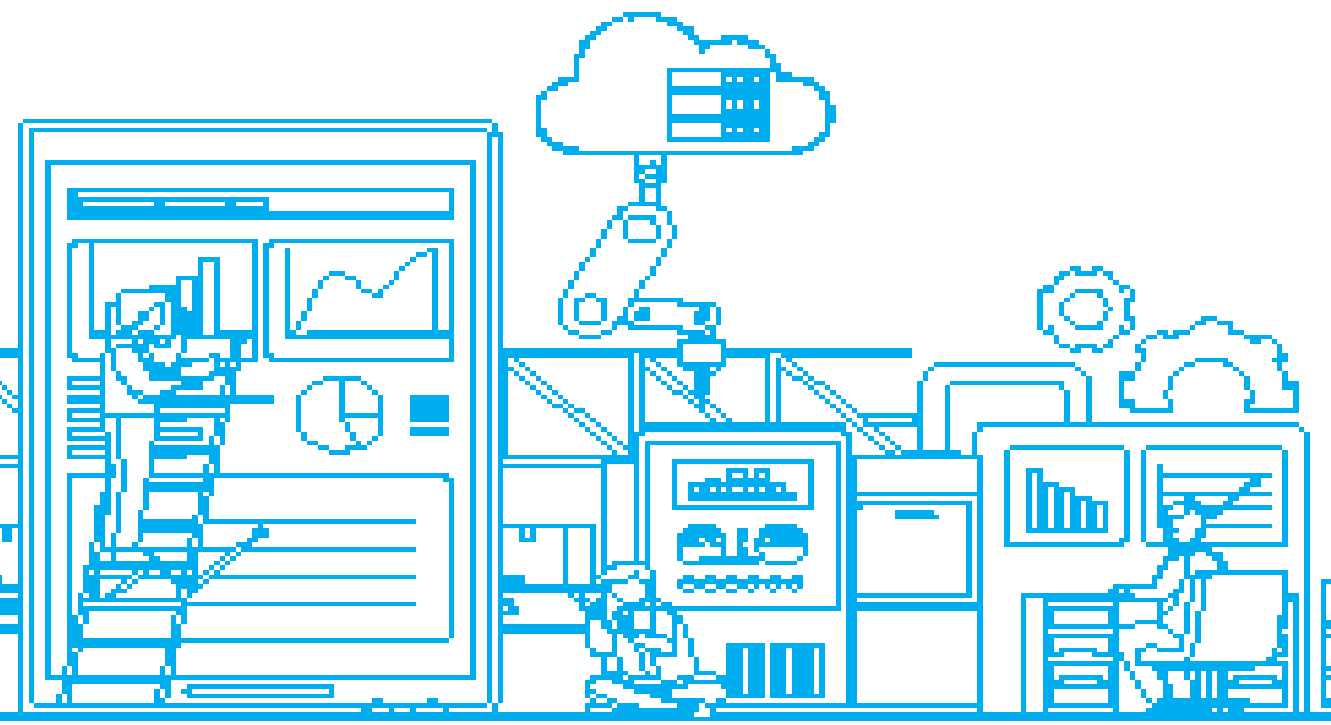
Pengarah
Aryanto

Penanggungjawab
Suri Handayani

Penyunting
Suri Handayani

Penulis
Daswita Tri Ariani

Penata Letak
Rosyita Darojati A'laa



Kata Pengantar

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan Semester 2-2023 merupakan publikasi baru yang dibuat oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan secara rutin akan terbit setiap semester. Publikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang ingin melihat perkembangan data sosial di Sulawesi Selatan secara berkala setiap semesternya. Diharapkan publikasi ini semakin memudahkan konsumen data dalam memahami data-data indikator makro sosial yang secara rutin dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan Semester 2-2023 berisi ulasan/analisis singkat tentang data-data indikator sosial Sulawesi Selatan antara lain perkembangan kependudukan, tenaga kerja, kemiskinan serta pembangunan manusia. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, dalam publikasi ini juga disertakan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang ditampilkan.

Semoga publikasi ini bias memberikan informasi barhagra bagi pengguna data BPS, baik aparat pemerintah maupun publik, dan diharapkan publikasi ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga publikasi ini bisa disajikan. Kritik dan saran akan sangat berharga untu penyempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Makassar, Februari 2024

Kepala Badan Pusat StatistiK
Provinsi Sulawesi Selatan



Aryanto

PENJELASAN TEKNIS

Penduduk

- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Sumber data penduduk yang tersedia secara periodik hanyalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk digunakan dalam proyeksi penduduk.
- Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi).

Kemiskinan

- Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

$$GK=GKM+GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.
- Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
- Ukuran Kemiskinan
 1. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

- Koefisien gini (Gini Rasio) didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

$$GR = 1 - \sum_{i=0}^n f_{pi} X (F_{ci} + F_{ci-1})$$

GR = Koefisien gini

F_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

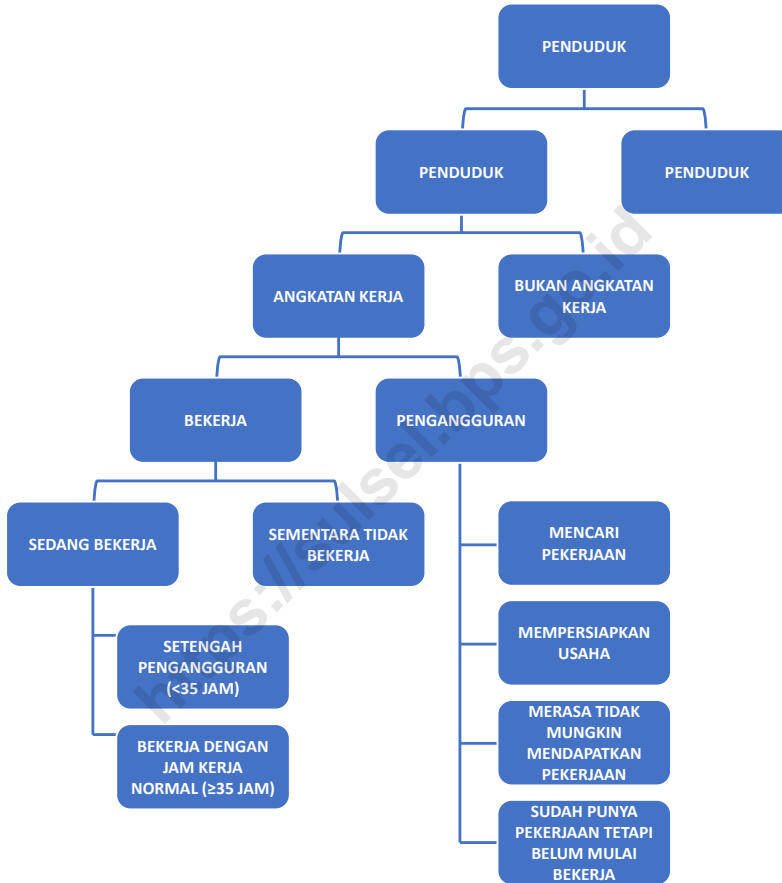
F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

- Gini Rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Gini Rasio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Ketenagakerjaan

- Konsep yang digunakan dalam data ketenagakerjaan adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:
- Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- Diagram Ketenagakerjaan



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks *longevity*, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM:
 1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator: Umur Harapan Hidup,
 2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,
 3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator: Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

- Status pembangunan manusia
 - Rendah : < 60
 - Sedang : $60 \leq IPM < 70$
 - Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
 - Sangat tinggi : ≥ 80
- Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

<https://sulsel.bps.go.id>

Daftar Isi

ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER 2-2023

v	·	KATA PENGANTAR
vii	·	PENJELASAN TEKNIS
xi	·	DAFTAR ISI
xiii	·	DAFTAR TABEL
xv	·	DAFTAR GAMBAR
	·	
1	·	BAB I
	·	PENDUDUK
	·	
7	·	BAB II
	·	KEMISKINAN
	·	
17	·	BAB III
	·	KETENAGAKERJAAN
	·	
27	·	BAB IV
	·	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
	·	
35	·	DAFTAR PUSTAKA

Daftar Gambar

ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER 2-2023

- 4 : Gambar 1.1 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan 2023
- 5 : Gambar 1.2 Proporsi penduduk menurut usia produktif dan nonproduktif, 2023
- 9 : Gambar 2.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2015–Maret 2023
- 10 : Gambar 2.2 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2018–Maret 2023
- 11 : Gambar 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan Wilayah Kota, Maret 2018–Maret 2023 (Rupiah)
- 11 : Gambar 2.4 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan Wilayah Desa, Maret 2018–Maret 2023 (Rupiah)
- 12 : Gambar 2.5 Perkembangan Komposisi Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2018–Maret 2023 (Rupiah)
- 14 : Gambar 2.6 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2018–Maret 2023
- 14 : Gambar 2.7 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2018–Maret 2023
- 15 : Gambar 2.8 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Selatan, Maret 2023
- 19 : Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2021–Agustus 2023
- 20 : Gambar 3.2 Persentase Penduduk bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2023
- 21 : Gambar 3.3 Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Kegiatan Utama, Agustus 2023
- 27 : Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2020–2023
- 28 : Gambar 4.2 Sebaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023
- 29 : Gambar 4.3 Komponen IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi, 2023
- 29 : Gambar 4.4 Umur Harapan Hidup saat lahir Kabupaten/Kota (Tahun), 2023
- 30 : Gambar 4.5 Sebaran Kabupaten/Kota menurut Indikator pada Indeks Pendidikan (HLS dan RLS), 2023
- 31 : Gambar 4.6 Sebaran Kabupaten/Kota menurut Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan dan Pertumbuhannya, 2023

Daftar Tabel

ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER 2-2023

3	•	Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023
13	•	Tabel 2.1	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), Maret 2023
19	•	Tabel 3.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan, Agustus 2021–Agustus 2023 (Orang)
21	•	Tabel 3.2	Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Kegiatan Utama, Agustus 2021–Agustus 2023 (Orang)
22	•	Tabel 3.3	Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2021–Agustus 2023 (orang)
23	•	Tabel 3.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023
24	•	Tabel 3.5	Karakteristik Pengangguran (persen), Agustus 2021–Agustus 2023



BAB I PENDUDUK

<https://sulsel.bps.go.id>

PENDUDUK

Jumlah penduduk provinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan mencapai 9,36 juta orang pada tahun 2023, dengan tren yang menunjukkan pertumbuhan yang bertahap hingga mencapai 10,44 juta pada tahun 2035. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 4,65 juta Jiwa, sedangkan penduduk perempuan yaitu sebanyak 4.71 juta jiwa. Distribusi umur menunjukkan bahwa populasi muda (0-34 tahun) didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan lebih mendominasi pada kelompok umur 35 tahun ke atas. Hal ini bisa menggambarkan perbedaan dalam tingkat kelangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan, yang mungkin dipengaruhi oleh akses ke layanan kesehatan, perilaku berisiko, dan kondisi kerja. Jumlah perempuan di kelompok umur yang lebih tua yang lebih banyak juga menggambarkan tren umum peningkatan harapan hidup perempuan dibandingkan laki-laki, yang terlihat secara global.

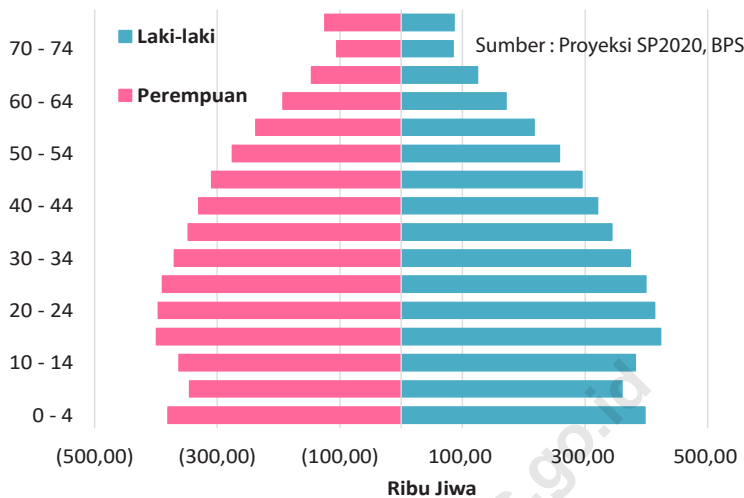
Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 4	398,03	380,68	778,71
5 - 9	360,49	345,30	705,79
10 - 14	381,93	362,84	744,77
15 - 19	423,36	399,17	822,53
20 - 24	413,58	396,35	809,92
25 - 29	398,91	389,32	788,23
30 - 34	373,72	370,29	744,01
35 - 39	343,96	347,35	691,31
40 - 44	320,76	330,03	650,79
45 - 49	295,15	309,11	604,26
50 - 54	257,80	275,34	533,14
55 - 59	216,92	237,42	454,35
60 - 64	170,88	192,62	363,50
65 - 69	124,88	146,18	271,06
70 - 74	84,70	104,71	189,41
75+	86,12	124,41	210,53
Jumlah	4.651,18	4.711,11	9.362,29

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020–2035

Rasio jenis kelamin, yang mengukur perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 98,73. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 99 laki-laki. Rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Toraja dengan 106,89, diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 105,28, dan Kabupaten Toraja Utara dengan 104,14. Hanya terdapat delapan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100, yang menandakan dominasi jumlah laki-laki. Sementara itu, kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin terendah adalah Kabupaten Soppeng dengan 93,60, Kabupaten Wajo dengan 94,70, dan Kabupaten Bulukumba dengan 95,45, menunjukkan dominasi perempuan. Rasio yang lebih rendah dari 100 ini tidak hanya mencerminkan jumlah penduduk perempuan yang

lebih besar, tetapi juga dapat memberikan wawasan penting tentang kebutuhan demografis dan sosial yang spesifik, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi dan mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesempatan kerja.

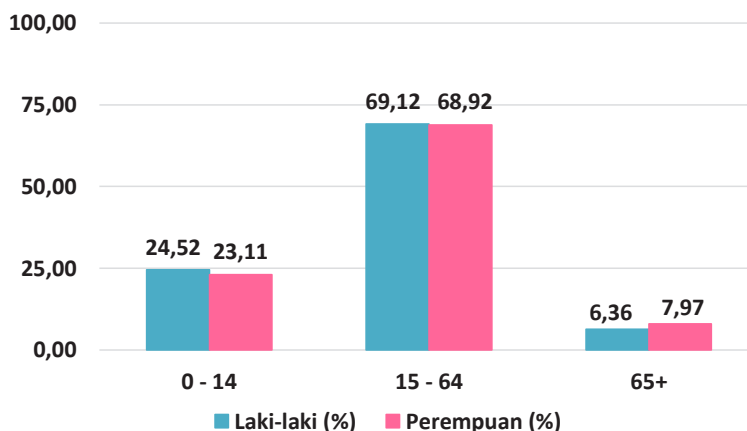


Gambar 1.1 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan 2023

Piramida penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menampilkan struktur yang expansive, yang ditandai dengan persentase penduduk muda yang besar. Bentuk piramida yang lebar di bagian bawah, yang direpresentasikan oleh kelompok umur 0-14 tahun, menunjukkan tingkat kelahiran relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan populasi muda yang besar ini menunjukkan potensi demografis yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, namun juga mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk investasi dalam pendidikan dasar, kesehatan anak, dan infrastruktur yang mendukung pengembangan anak.

Cembungan pada bagian tengah piramida, yang mencakup kelompok umur produktif, menunjukkan bahwa ada basis penduduk yang cukup besar yang sedang berada di puncak potensi ekonominya. Hal ini membawa peluang sekaligus tantangan, berupa peluang dalam hal kontribusi ekonomi dan pembangunan, serta tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup dan memenuhi ekspektasi pendidikan dan kesehatan yang berkembang.

Sementara itu, keruncingan piramida pada kelompok umur 65 tahun ke atas menandakan proporsi penduduk lansia yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal ini merupakan karakteristik dari populasi yang masih berada dalam fase transisi demografi, dimana tingkat kelahiran dan kematian yang berkurang belum sepenuhnya tercermin dalam proporsi penduduk lansia yang lebih besar. Keruncingan pada bagian atas piramida ini dapat mengindikasikan bahwa saat ini, beban sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan penduduk lansia masih dalam kapasitas yang lebih terkelola oleh sistem kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Namun, kecenderungan ini juga memberikan indikasi penting untuk perencanaan jangka panjang. Seiring berjalannya waktu dan dengan peningkatan harapan hidup, akan terjadi pertumbuhan jumlah lansia yang akan membutuhkan perhatian khusus dalam hal layanan kesehatan, dukungan sosial, dan infrastruktur yang ramah lansia.



Gambar 1.2 Proporsi Penduduk Menurut Usia Produktif dan Non Produktif, 2023

Sumber : Proyeksi SP2020, BPS

Gambar 1.2 menggambarkan proporsi penduduk Sulawesi Selatan menurut kelompok usia produktif dan nonproduktif untuk tahun 2023. Dengan mayoritas penduduk berusia 15 hingga 64 tahun, yaitu 69,12 persen dari populasi laki-laki dan 68,92 persen dari populasi perempuan, struktur umur ini menunjukkan bahwa proporsi besar penduduk berada dalam kelompok tenaga kerja. Di sisi lain, penduduk usia nonproduktif, yang terdiri dari penduduk muda (0-14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas), memiliki proporsi yang lebih kecil, dengan 24,52 persen untuk laki-laki dan 23,11 persen untuk perempuan penduduk muda nonproduktif, serta 6,36 persen untuk laki-laki dan 7,97 persen untuk perempuan pada lansia.

Rasio ketergantungan, yang mengukur jumlah individu usia nonproduktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah individu usia produktif (15-64 tahun) dalam suatu populasi, tercatat di Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah 44,88. Angka ini menandakan bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 45 orang usia nonproduktif. Proporsi ini mencerminkan bahwa beban ekonomi yang diberikan oleh penduduk nonproduktif terhadap populasi usia kerja berada dalam kondisi yang relatif seimbang. Dalam konteks ini, proporsi penduduk usia produktif yang signifikan terhadap penduduk nonproduktif menunjukkan fase yang sering diidentifikasi sebagai "bonus demografi". Dengan populasi yang lebih muda dan produktif, Sulawesi Selatan memiliki peluang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Meskipun demikian, periode bonus demografi tidak secara otomatis menjamin pertumbuhan ekonomi. Periode ini memberikan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi dan sosial, tergantung pada berbagai faktor termasuk kebijakan publik, jenis investasi yang disediakan untuk generasi muda, dan kondisi pasar kerja.

BAB II

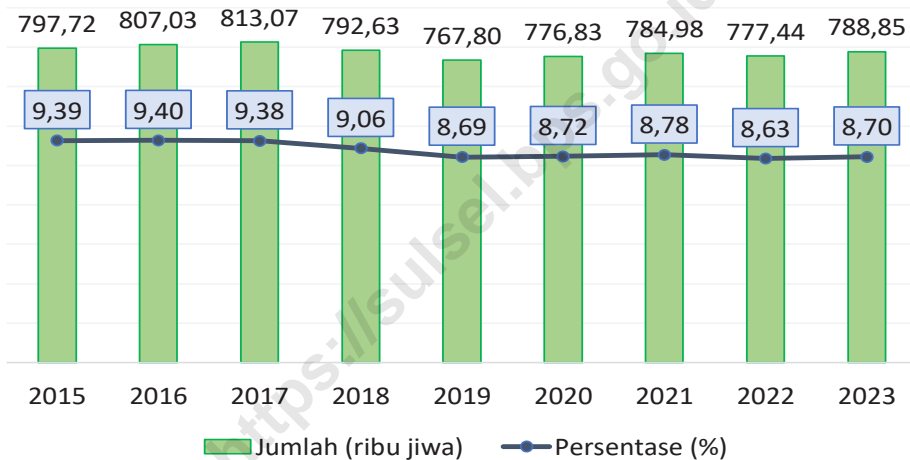
KEMISKINAN

<https://sulsel.bps.go.id>

KEMISKINAN

2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dari Maret 2015 hingga Maret 2023 mengindikasikan tantangan yang berkelanjutan dalam menangani kemiskinan. Pada Maret 2023, tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 788,85 ribu jiwa, menunjukkan peningkatan sebesar 11,41 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin di tahun yang sama mencapai 8,70 persen, artinya hampir sembilan dari setiap seratus penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.



Gambar 2.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2015–Maret 2023

Sumber : BRS Kemiskinan, BPS Prov. Sulsel

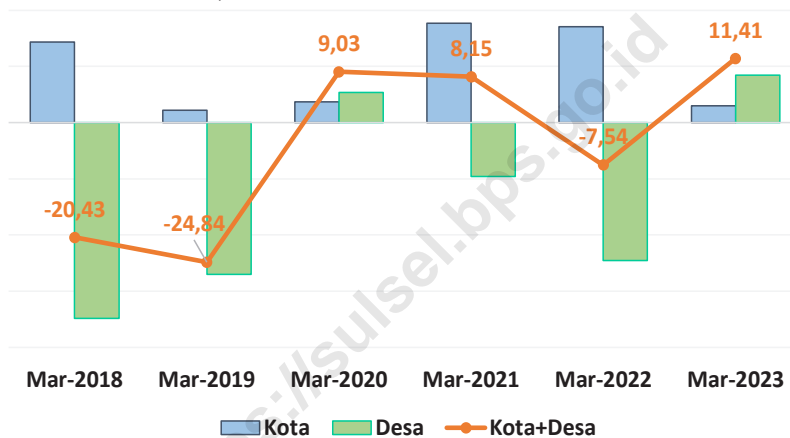
Tren selama sembilan tahun terakhir mengungkapkan bahwa, meskipun telah ada penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 8,87 ribu orang sejak Maret 2015, terdapat peningkatan sebesar 21,05 ribu orang sejak Maret 2019. Ini menggambarkan dampak ekonomi jangka panjang dari berbagai faktor termasuk pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin yang meningkat bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, meskipun dihadapkan dengan tren penurunan persentase kemiskinan, menandakan kompleksitas isu kemiskinan yang tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dengan distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar.

Perubahan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan selama periode Maret 2018 hingga Maret 2023 menampilkan dinamika yang berbeda antara wilayah desa dan kota. Seperti terlihat pada Gambar 2.2, periode Maret 2018 dan Maret 2019 menandai penurunan jumlah penduduk miskin di desa, yang mengakibatkan penurunan total jumlah penduduk miskin yang signifikan sebesar 20,43 ribu jiwa dan 24,84 ribu jiwa. Sementara itu, wilayah kota mengalami tren yang berlawanan, dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Tahun 2020 mencatat kenaikan jumlah penduduk miskin di kedua wilayah, yang mencerminkan dampak langsung dari tantangan ekonomi global, termasuk pengaruh pandemi COVID-19. Tahun 2021 menunjukkan pembalikan tren di desa dengan penurunan jumlah penduduk miskin, sedangkan kota mengalami penambahan. Penurunan jumlah penduduk miskin di desa dapat dihubungkan dengan sejumlah faktor, termasuk program intervensi sosial dan perekonomian, serta adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang berubah.

Pada tahun 2022, desa melanjutkan tren penurunan jumlah penduduk miskin, menghasilkan penurunan total di wilayah kota dan desa. Namun, tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 11,41 ribu jiwa, mencerminkan bahwa desa dan kota sama-sama menghadapi tantangan dalam mengurangi kemiskinan.

Sumber : BRS Kemiskinan, BPS Prov. Sulsel



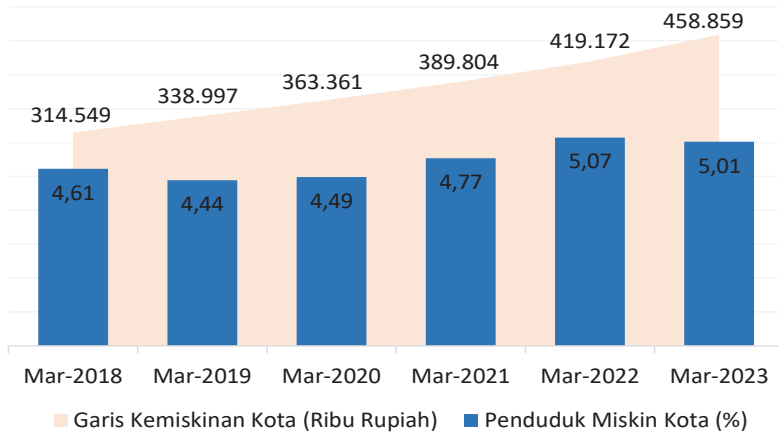
Gambar 2.2 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) di Sulawesi Selatan Menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2018–Maret 2023

2.2 Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2018 – Maret 2023

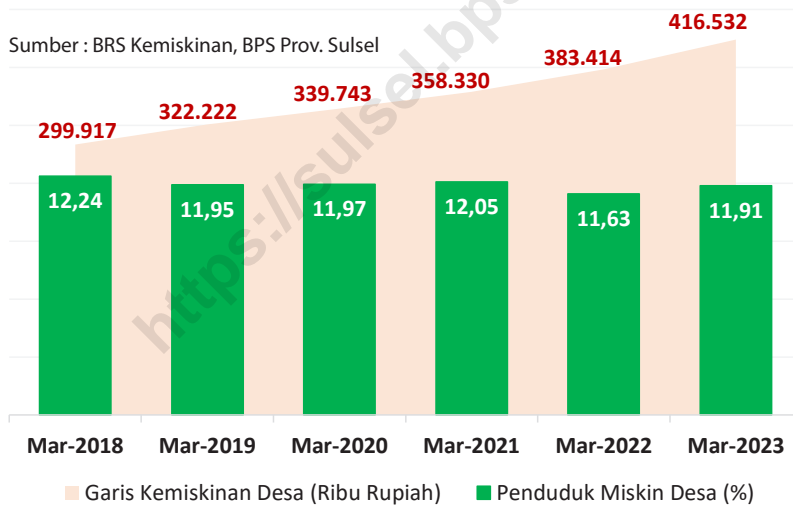
Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) di area perkotaan Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2023 menggambarkan adaptasi kebutuhan minimum masyarakat dalam menghadapi perubahan harga barang dan jasa. GK, yang mencerminkan nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, telah mengalami penyesuaian seiring waktu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.3. Pada tahun 2018, angka GK berada pada Rp 314.549 per kapita per bulan, dengan 4,61 persen penduduk kota berada di bawah ambang ini. Naiknya angka GK menjadi Rp 458.859 di tahun 2023 berimplikasi pada peningkatan biaya hidup, meskipun persentase penduduk miskin tetap relatif stabil di angka 5,01 persen.

Stabilitas ini dapat mencerminkan berbagai faktor ekonomi dan sosial yang berinteraksi dalam menentukan tingkat kemiskinan, termasuk namun tidak terbatas pada diversifikasi sumber pendapatan, efektivitas program perlindungan sosial, serta akses terhadap layanan dasar. Namun, keberadaan sejumlah penduduk yang tetap berada di bawah GK memperlihatkan bahwa ada segmen populasi perkotaan yang masih rentan terhadap kemiskinan.

Sumber : BRS Kemiskinan, BPS Prov. Sulsel



Gambar 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan Wilayah Kota, Maret 2018–Maret 2023 (Rupiah)

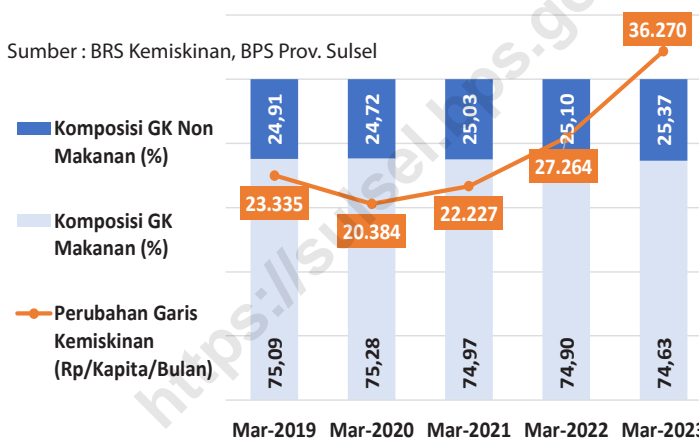


Gambar 2.4 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan Wilayah Desa, Maret 2018–Maret 2023 (Rupiah)

Garis Kemiskinan di wilayah desa Sulawesi Selatan, yang ditampilkan dalam Gambar 2.4, menunjukkan peningkatan nominal dari Rp 299.917 pada Maret 2018 menjadi Rp 416.532 pada Maret 2023. Selama periode yang sama, persentase penduduk miskin di desa menunjukkan penurunan dari 12,24 persen menjadi 11,91 persen. Penurunan ini, meskipun relatif kecil, menunjukkan bahwa sebagian penduduk desa telah berhasil meningkatkan pengeluaran mereka di atas batas kemiskinan. Perbandingan antara tahun 2018 dan 2023 menunjukkan bahwa, walaupun Garis Kemiskinan meningkat sekitar 38,9 persen, persentase penduduk miskin hanya mengalami penurunan 0,33 poin persentase. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau kebijakan sosial di desa mungkin telah berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan atau setidaknya dalam mencegah kenaikan lebih lanjut dalam jumlah penduduk miskin.

Gambar 2.5 memperlihatkan bagaimana komposisi Garis Kemiskinan (GK) Sulawesi Selatan, yang dibagi menjadi dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan (GK Makanan) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GK Non Makanan), telah berkembang dari Maret 2018 hingga Maret 2023. Pada Maret 2023, komposisi GK Makanan masih menunjukkan porsi yang signifikan sebesar 74,63 persen, yang mengindikasikan pentingnya kebutuhan makanan dalam menentukan standar kemiskinan di wilayah ini. Selama periode ini, terjadi peningkatan proporsi GK Non Makanan, yang pada tahun 2023 mencapai 25,37 persen. Hal ini menggambarkan pergeseran dalam pola konsumsi penduduk Sulawesi Selatan, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan barang dan jasa non-makanan. Pertumbuhan persentase ini bisa mencerminkan perubahan dalam standar hidup dan prioritas pengeluaran penduduk.

Garis kemiskinan secara keseluruhan juga menunjukkan pertumbuhan, sejalan dengan inflasi dan perubahan harga barang dan jasa yang terus bergerak. Dari tahun 2018 hingga 2023, terjadi kenaikan nominal GK dari Rp 23.335 menjadi Rp 36.270. Kenaikan ini mencerminkan penyesuaian terhadap biaya hidup yang terus meningkat.



Gambar 2.5 Perkembangan Komposisi Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2018–Maret 2023 (Rupiah)

Pada Maret 2023, beras, sebagai komponen utama, menunjukkan kontribusi yang paling signifikan terhadap GK, dengan 20,21 persen di perkotaan dan 24,93 persen di pedesaan. Hal ini menggarisbawahi peran beras sebagai makanan pokok yang krusial bagi warga Sulawesi Selatan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Rokok kretek filter, sebagai barang non-kebutuhan dasar, terus menjadi komoditas penting dalam pengeluaran penduduk, dengan sumbangan yang hampir seragam antara kota (12,30 persen) dan desa (12,78 persen). Ini mencerminkan prevalensi merokok di berbagai lapisan masyarakat, meskipun dampaknya terhadap kesehatan dan ekonomi keluarga bisa menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan.

Komoditas telur ayam ras dan bandeng menunjukkan kontribusi yang signifikan pada GK makanan, dengan telur menyumbang sekitar 3,28 persen di kota dan 3,30 persen di desa, sementara bandeng menyumbang 3,22 persen di kota dan 3,00 persen di desa. Kedua komoditas ini mencerminkan pola konsumsi protein hewani yang penting bagi nutrisi dan kesehatan penduduk. Dari sisi non-makanan, perumahan memimpin dengan sumbangan terbesar dalam komposisi GK, yang mencerminkan pentingnya biaya tempat tinggal dalam

pengeluaran rumah tangga. Selain itu, proporsi perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan yang konsisten lebih tinggi di perkotaan semakin menegaskan biaya hidup di kota yang cenderung lebih tinggi.

Tabel 2.1 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), Maret 2023

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Makanan:	71,70	Makanan:	77,47
Beras	20,21	Beras	24,93
Rokok kretek filter	12,30	Rokok kretek filter	12,78
Telur ayam ras	3,28	Telur ayam ras	3,30
Bandeng	3,22	Bandeng	3,00
Kue basah	2,64	Gula pasir	2,46
Tongkol/tuna/cakalang	2,41	Tongkol/tuna/cakalang	2,37
Mie Instan	2,32	Mie instan	2,24
Kembung	2,14	Kue basah	2,12
Daging ayam ras	1,92	Roti	2,02
Gula Pasir	1,84	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,50
Teri	1,58	Daging ayam ras	1,15
Roti	1,50	Kembung	1,13
lainnya	19,43	lainnya	20,75
Bukan Makanan:	28,30	Bukan Makanan:	22,53
Perumahan	9,63	Perumahan	8,24
Bensin	4,92	Bensin	4,87
Listrik	3,17	Listrik	1,81
Pendidikan	1,63	Pendidikan	0,96
Perlengkapan mandi	1,28	Perlengkapan mandi	0,91
Air	0,83	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,56
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,79	Sabun cuci	0,55
lainnya	4,24	lainnya	3,23

Sumber : BRS Kemiskinan Maret 2023

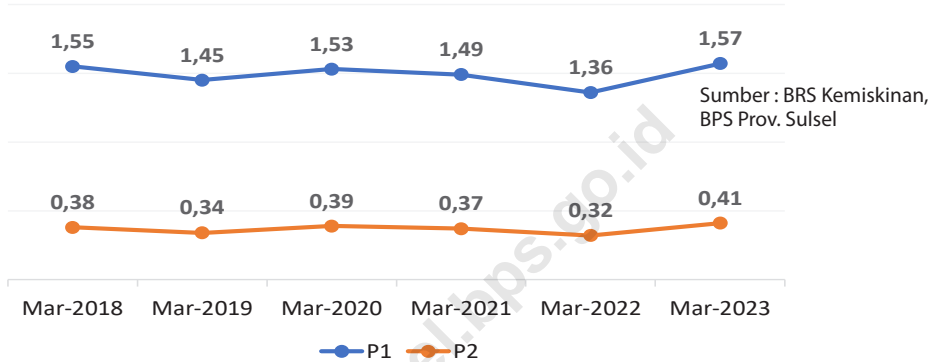
2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, sering kali fokus hanya diletakkan pada jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, untuk memahami secara lebih mendalam tentang kemiskinan, perlu juga melihat seberapa jauh pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan dan seberapa besar ketimpangan di antara mereka. Dua indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan.

Gambar 2.6 menyajikan dua indikator penting dalam pengukuran kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Selatan dari Maret 2018 hingga Maret 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mencerminkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Pada Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan berada pada angka 1,57 persen, menunjukkan bahwa rata-rata kekurangan pengeluaran penduduk miskin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa, meskipun mungkin

jumlah penduduk miskin tidak bertambah banyak, tingkat kemiskinan mereka semakin dalam. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat menjadi 0,41 persen, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan di dalam kelompok penduduk miskin juga mengalami peningkatan.

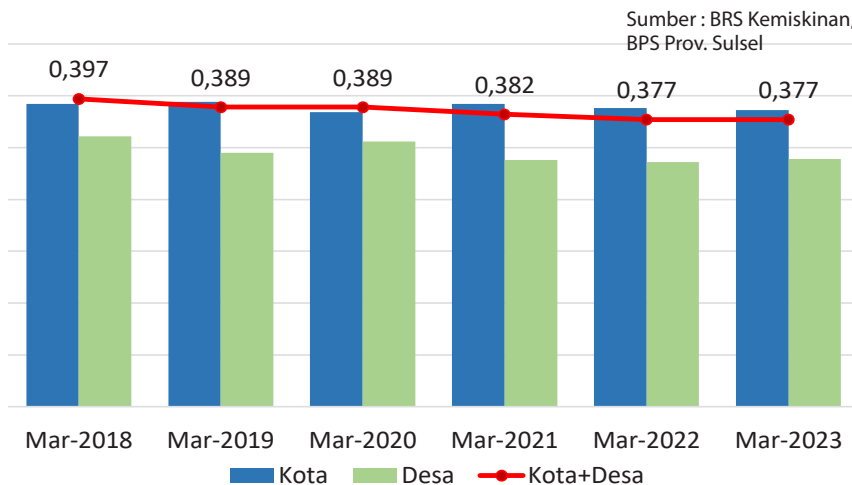
Ketika dilihat lebih lanjut, disparitas antara area perkotaan dan perdesaan tetap konsisten, dengan perdesaan menunjukkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih tinggi. Ini dapat mencerminkan berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang lebih kompleks di pedesaan, termasuk akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang ekonomi.



Gambar 2.6 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2018–Maret 2023

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,712, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,310. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,163, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,621.

2.4 Perkembangan Gini Ratio



Gambar 2.7 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2018–Maret 2023

Dalam melihat dinamika kemiskinan dan ketimpangan, Gini Ratio menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur sejauh mana distribusi pendapatan di masyarakat. Sebuah nilai Gini Ratio yang mendekati 0 menandakan distribusi yang merata, sementara mendekati 1 menandakan ketimpangan yang tinggi.

Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang menarik dari Maret 2018 hingga Maret 2023. Terdapat penurunan nilai dari 0,397 di Maret 2018 menjadi 0,377 di Maret 2022, yang mengindikasikan penurunan dalam ketimpangan pendapatan. Stagnasi nilai ini pada Maret 2023, yang tetap pada 0,377, dapat dilihat sebagai stabilisasi dari ketimpangan yang sebelumnya mengalami penurunan.

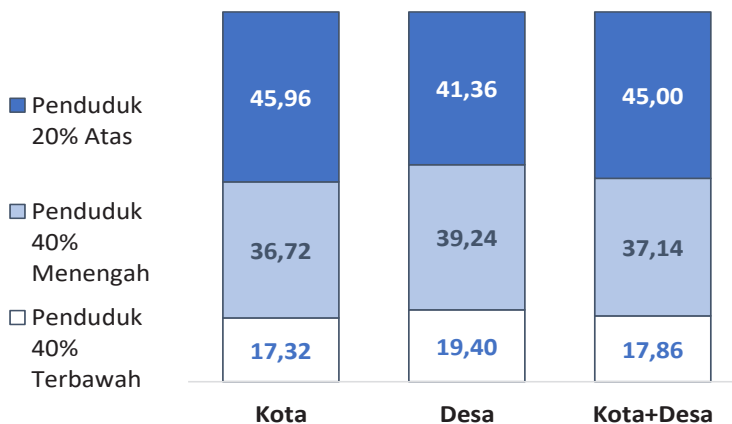
Di perkotaan, nilai Gini Ratio lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, menunjukkan bahwa ketimpangan di area perkotaan lebih terasa. Hal ini bisa jadi karena adanya konsentrasi kesempatan kerja dan sumber daya di perkotaan yang tidak tersebar secara merata. Meskipun demikian, perbedaan nilai antara perkotaan dan pedesaan tidak menunjukkan disparitas yang signifikan.

2.5 Perkembangan Distribusi Pengeluaran

Dalam menganalisis distribusi pengeluaran penduduk, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah seringkali digunakan sebagai indikator ketimpangan ekonomi. Penggunaan metode ini memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2023, persentase pengeluaran penduduk 40 persen terbawah berada pada angka 17,86 persen, yang menurut kriteria Bank Dunia, masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan tidak dikonsentrasikan hanya pada segelintir individu tetapi didistribusikan dengan lebih luas di antara populasi yang lebih besar.

Sumber : BRS Kemiskinan, BPS Prov. Sulsel



Gambar 2.8 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Selatan, Maret 2023

Perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan mengungkapkan perbedaan yang mencolok. Di daerah pedesaan, persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah lebih tinggi (19,40%) dibandingkan dengan daerah perkotaan (17,32%). Ini dapat menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di pedesaan mungkin lebih merata dibandingkan dengan perkotaan, di mana ada kecenderungan terjadinya akumulasi kekayaan atau pendapatan yang lebih besar pada lapisan penduduk atas.

Sementara itu, untuk penduduk 20% atas, proporsi pengeluarannya jauh lebih tinggi di daerah perkotaan (45,96%) dibandingkan dengan pedesaan (41,36%). Ini menegaskan kembali bahwa pendapatan di perkotaan lebih condong pada distribusi yang tidak merata, dengan kelompok atas menguasai proporsi yang lebih besar dari keseluruhan pengeluaran.

Secara keseluruhan, distribusi pengeluaran yang lebih merata di pedesaan mencerminkan sebaran ekonomi yang lebih homogen. Sebaliknya, konsentrasi pengeluaran yang lebih tinggi di kelompok atas di perkotaan mungkin mencerminkan dinamika pasar kerja yang lebih kompetitif, biaya hidup yang lebih tinggi, serta akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan kesempatan.

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB III

KETENAGAKERJAAN

<https://sulsel.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN

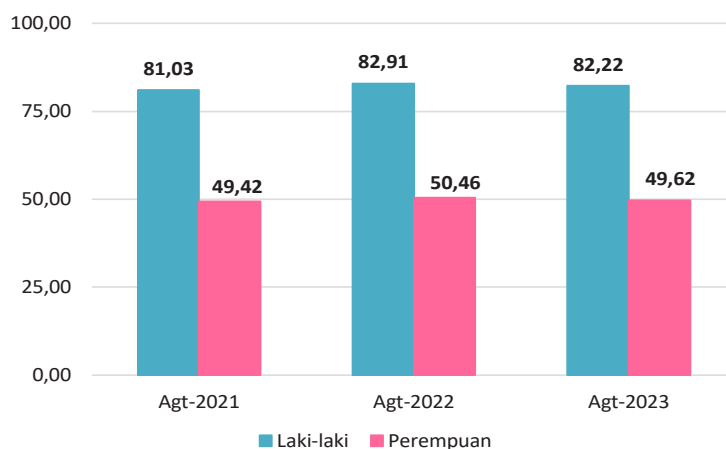
3.1 Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan

Angkatan kerja merupakan istilah yang merujuk pada sekelompok penduduk dalam usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja. Sesuai dengan *The Labor Force Concept* dari *International Labour Organization (ILO)* yang diadopsi oleh BPS, angkatan kerja mencakup mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Dalam hal ini, termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tabel 3.1 Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan, Agustus 2021–Agustus 2023

Kegiatan	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	4.412.782	4.559.375	4.694.483
Bekerja	4.160.433	4.353.650	4.490.983
(%)	94,28	95,49	95,67
Pengangguran	252.349	205.725	203.500
(%)	5,72	4,51	4,33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,73	66,18	65,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,72	4,51	4,33

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel



Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2021–Agustus 2023

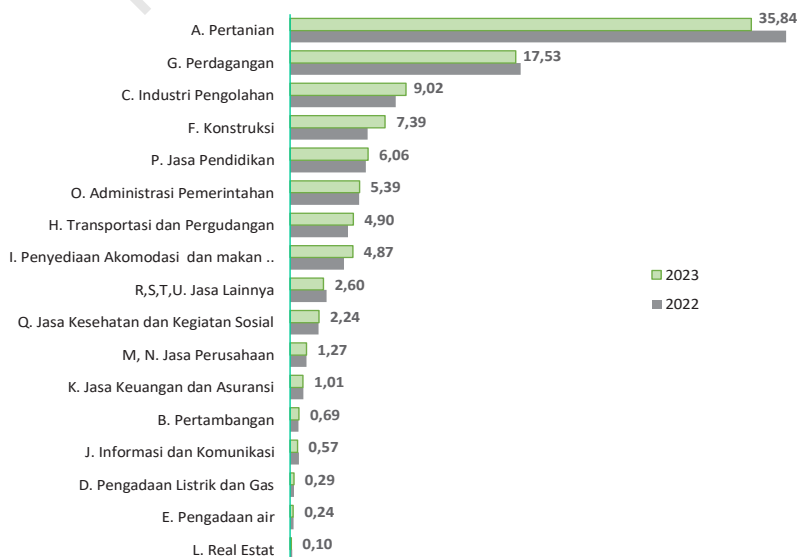
Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Pada Agustus 2023, jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan sebesar 4.694.483 orang. Angka ini terdiri dari 4.490.983 penduduk yang bekerja, atau sekitar 95,67 persen dari total angkatan kerja, dan 205.725 penduduk yang menganggur atau sekitar 4,33 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2022, jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 3,15 persen, sedangkan yang menganggur turun 1,08 persen

Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 yang mencapai 65,66 persen. Dibandingkan keadaan pada Agustus 2022, TPAK turun sebesar 0,52 poin dari 66,18 persen. Turunnya nilai TPAK menunjukkan bahwa terdapat indikasi semakin menurunnya pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Pada Agustus 2023, TPAK laki-laki mencapai 82,22 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 49,62 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPAK laki-laki turun 0,69 poin, sedangkan TPAK perempuan turun 0,85 poin. Gap antara TPAK laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

3.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah penduduk pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2022 didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 35,84 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,53 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 9,02 persen.



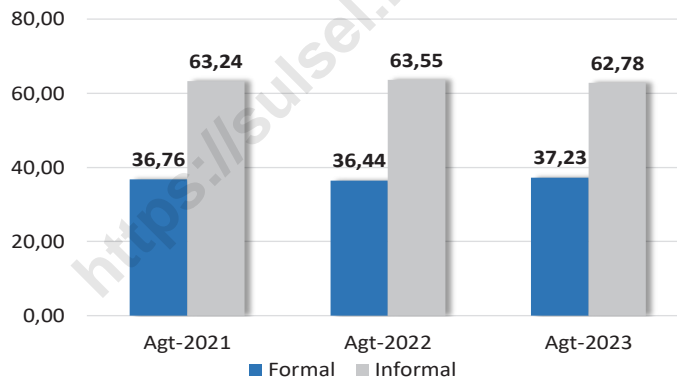
Gambar 3.2 Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2023

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat 8 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase jumlah penduduk yang bekerja, dengan peningkatan terbesar terjadi lapangan pekerjaan Konstruksi yang meningkat sebesar 1,37 poin diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 0,83 poin serta Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 0,68 poin. Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan paling tinggi sebesar 2,68 poin, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0.39 poin dan Jasa Lainnya sebesar 0,22 poin.

3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 62,78 persen, meningkat 0,77 poin dibandingkan Agustus 2022. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan 0.79 poin menjadi 37.23 persen.



Gambar 3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2021–Agustus 2023
Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Tabel 3.2 Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Kegiatan Utama, Agustus 2021–Agustus 2023 (orang)

Kegiatan Utama	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Berusaha sendiri	874.829	994.371	1.068.775
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	815.412	826.966	749.430
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	134.278	143.320	137.536
Buruh/karyawan/pegawai	1.395.069	1.443.452	1.534.390
Pekerja bebas di pertanian	126.180	103.020	94.237
Pekerja bebas di nonpertanian	136.924	103.553	160.815
Pekerja keluarga/tidak dibayar	677.741	738.968	745.800
Jumlah	4.160.433	4.353.650	4.490.983

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 34,17 persen, sementara paling sedikit berstatus pekerja bebas di pertanian yaitu sebesar 2,10 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, dan pekerja bebas di nonpertanian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,96 persen poin, 1,01 persen poin, dan 1,20 persen poin. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,31 persen poin.

3.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Seperti halnya kondisi pada tahun 2021-2022, penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2023 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 2.384.238 orang (53,09 persen). Sedangkan pekerja berpendidikan menengah (SMA/SMK sederajat) sebanyak 1.367.618 orang (30,45 persen), lebih tinggi daripada kondisi Agustus 2022. Penduduk berpendidikan tinggi hanya sebanyak 739.127 orang (16,45 persen), yang terdiri dari 96.762 orang (2,15 persen) berpendidikan Diploma I/II/III dan 642.365 orang (14,30 persen) berpendidikan Diploma IV ke atas.

Tabel 3.3 Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2021–Agustus 2023

Kegiatan Utama	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
SD ke Bawah	1.674.651	1.733.118	1.710.459
Sekolah Menengah Pertama	617.479	644.307	673.779
Sekolah Menengah Atas	828.391	979.274	1.011.284
Sekolah Menengah Kejuruan	325.713	305.533	356.334
Diploma I/II/III	113.184	103.067	96.762
Diploma IV, S1, S2, S3	601.015	588.351	642.365
Jumlah	4.160.433	4.353.650	4.490.983

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan SMP, SMA, SMK, serta Diploma IV, S1, S2, S3 pada Agustus 2023 mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 0,20 persen poin, 0,02 persen poin, 0,92 persen poin, dan 0,79 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase masing-masing sebesar 1,72 persen poin dan 0,21 persen poin dibandingkan pada february 2022.

3.5 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (minimal 35 jam per minggu), dengan persentase sebesar 62,33 persen pada Agustus 2023, sedangkan 37,67 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (bekerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2022, pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 1,66 persen poin.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023

Kegiatan Utama	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Pekerja Penuh (≥ 35 jam)	60,07	63,99	62,33
Pekerja Tidak Penuh (1–34 jam)	39,93	36,01	37,67
Setengah Pengangguran	7,42	6,23	7,09
Pekerja Paruh Waktu	32,52	29,78	30,58

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2023 adalah sebesar 7,09 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar tujuh orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen poin.

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Sulawesi Selatan pada Agustus 2023 sebesar 37,67 persen, artinya dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 37 hingga 38 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 1,66 persen poin.

3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dapat dilihat dari nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penganggur terbuka mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada Agustus 2023 adalah 4,33 persen, mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin TPT laki-laki sebesar 4,39 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,25 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022, sedangkan TPT perempuan mengalami peningkatan 0,35 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,24 persen) lebih tinggi dua kali TPT di daerah perdesaan (2,80 persen). TPT di perkotaan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022 sebesar 1,60 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,89 persen poin.

Tabel 3.5 Karakteristik Pengangguran (Persen), Agustus 2021–Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,72	4,51	4,33
TPT Menurut Jenis Kelamin			
- Laki-laki	5,71	4,91	4,39
- Perempuan	5,73	3,90	4,25
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal			
- Perkotaan	9,59	7,84	6,24
- Perdesaan	2,76	1,91	2,80
TPT Menurut Tingkat Pendidikan			
- SD Ke Bawah	2,48	2,34	1,89
- SMP	5,19	4,05	2,52
- SMA	8,64	8,19	7,44
- SMK	11,34	6,04	6,99
- Diploma I/II/III	6,66	3,15	5,19
- Universitas	7,38	4,33	5,82

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,44 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 1,89 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada kategori pendidikan SD ke bawah, SMP, dan SMA, dengan penurunan terbesar pada kategori pendidikan SMP yaitu sebesar 1,54 persen poin. Sebaliknya peningkatan TPT terjadi pada kategori pendidikan SMK, Diploma I/II/III, serta Diploma IV, S1, S2, S3, dengan peningkatan terbesar pada kategori pendidikan Diploma I/II/III sebesar 2,04 persen poin.

BAB IV: : : INDEKS: : : PEMBANGUNAN : : : MANUSIA . . .

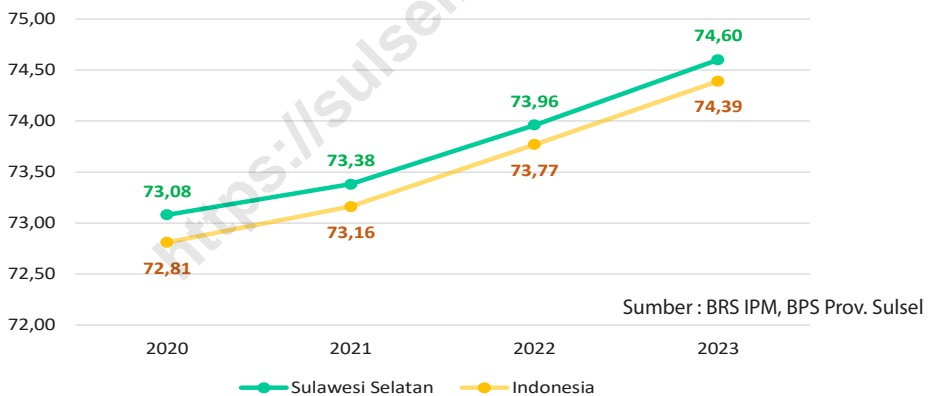
<https://sulsel.bppp.go.id>



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

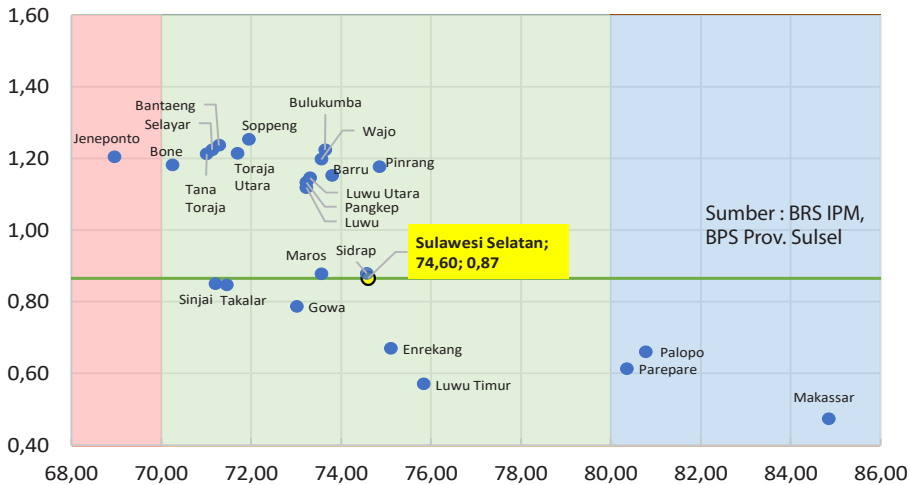
4.1 Perkembangan IPM

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita. Mulai tahun 2023, BPS melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir menggunakan hasil *Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020-LF)* yang memberikan gambaran lebih akurat dan terkini.



Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan, 2020–2023

IPM Sulawesi Selatan telah menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, mencapai angka 74,60 pada tahun 2023, yang menandakan pertumbuhan sebesar 0,87 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa Sulawesi Selatan berada dalam kategori IPM tinggi. Di tahun yang sama, terdapat 31 provinsi lain di Indonesia yang juga diklasifikasikan dalam kategori yang sama. Dari tahun 2020 hingga 2023, tercatat peningkatan IPM Sulawesi Selatan sebesar 1,52 poin. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,69 persen ini mencerminkan peningkatan yang stabil. Pertumbuhan ini sejalan dengan perbaikan yang terjadi secara keseluruhan dalam komponen-komponen yang membentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.



Gambar 4.2 Sebaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Gambar 4.2 mengilustrasikan sebaran IPM kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berdasarkan capaian angka IPM dan laju pertumbuhannya pada tahun 2023. Sumbu horizontal menunjukkan angka IPM, dimana semakin ke kanan posisi kabupaten/kota, semakin tinggi pula capaian angka IPM-nya pada tahun 2023. Adapun sumbu vertical menggambarkan laju pertumbuhan IPM, dimana posisi yang lebih tinggi menandakan laju pertumbuhan yang lebih cepat.

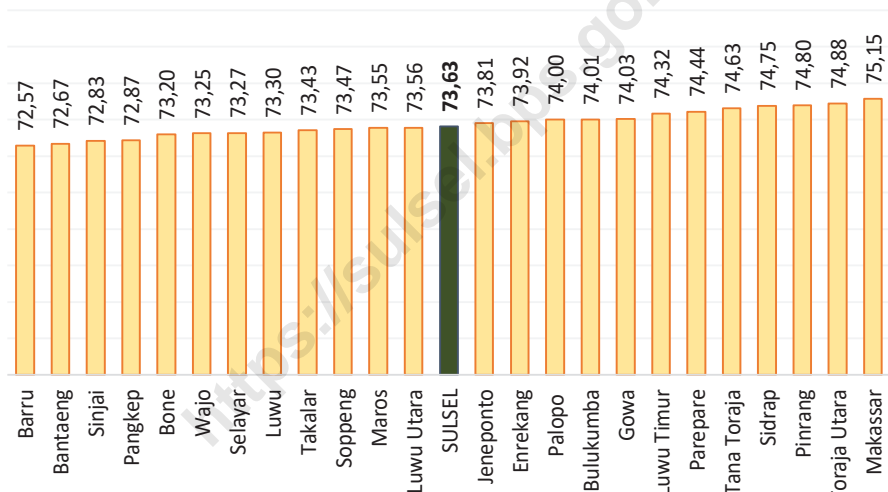
Kota Makassar, Palopo, dan Parepare menonjol sebagai wilayah di Sulawesi Selatan dengan IPM yang sangat tinggi, masing-masing mencapai angka 84.85, 80.77, dan 80.36 (berada pada kotak biru). Kabupaten/kota yang terletak di area kotak hijau menunjukkan bahwa mereka berada dalam kategori tinggi untuk IPM, namun beberapa di antaranya seperti Sinjai, Takalar, Gowa, Enrekang, dan Luwu Timur menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif moderat dibandingkan Sulawesi Selatan secara umum, yang mengindikasikan bahwa meski capaian mereka tinggi, ada peluang untuk percepatan pertumbuhan di masa mendatang. Di sisi lain, kabupaten Jeneponto, yang termasuk dalam kategori sedang (terletak di area kotak merah), menunjukkan bahwa ada ruang yang signifikan untuk peningkatan dan pembangunan manusia yang lebih cepat.

Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 didorong oleh peningkatan di semua indeks komponen pembentuknya. Komponen indeks standar hidup layak, yang tercermin melalui indikator pengeluaran per kapita (PPP) yang disesuaikan, menunjukkan akselerasi terbesar dengan peningkatan sebesar 3,60 persen atau Rp 411.000, menandakan peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk. Dimensi pengetahuan, yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,07 persen dan 1,51 persen, yang mencerminkan perluasan akses dan kualitas pendidikan formal, terutama dengan peningkatan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII (SMP kelas II). Sementara itu, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH) menunjukkan peningkatan sebesar 0,631 persen atau meningkat 0,23 poin dari tahun sebelumnya, yang dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari peningkatan akses ke layanan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.



Gambar 4.3 Komponen IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi, 2023

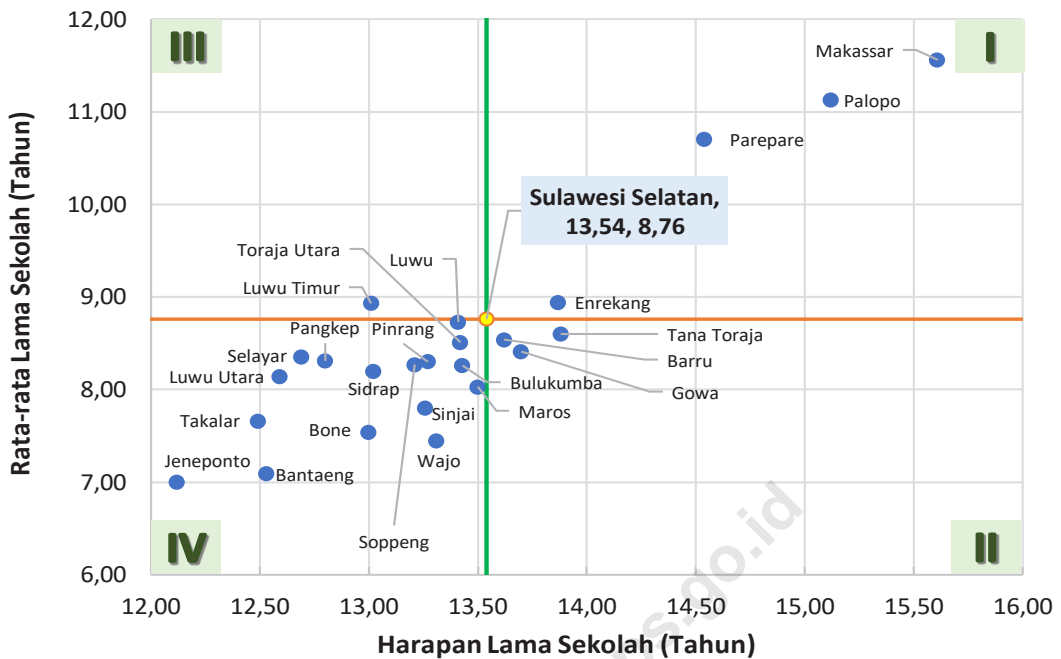
Sumber : BRS IPM, BPS Prov. Sulsel



Gambar 4.4 Umur Harapan Hidup saat lahir Kabupaten/Kota (Tahun), 2023

Sumber : BRS IPM-BPS Prov. Sulsel, diolah

Berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan menunjukkan variasi yang signifikan dalam indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2023, dengan perhitungan yang berdasarkan asumsi bahwa tingkat kelahiran dan kematian saat ini tetap konstan. Kota Makassar menonjol dengan UHH tertinggi di angka 75,15 tahun, mengindikasikan bahwa penduduk yang lahir pada tahun 2023 di kota ini memiliki ekspektasi hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang lahir di kabupaten atau kota lain di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, kabupaten Barru memiliki UHH terendah yaitu 72,57 tahun. Variasi ini mencerminkan tidak hanya heterogenitas dalam ketersediaan dan akses ke layanan kesehatan, tetapi juga berbagai faktor demografi lain seperti struktur umur penduduk, tingkat fertilitas dan morbiditas, serta perubahan sosial ekonomi yang terjadi di setiap wilayah. Sementara itu, UHH provinsi Sulawesi Selatan berada di angka 73,63 tahun, memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan penduduk Sulawesi Selatan secara umum, dimana penduduk yang lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat hidup hingga usia 73,63 tahun.



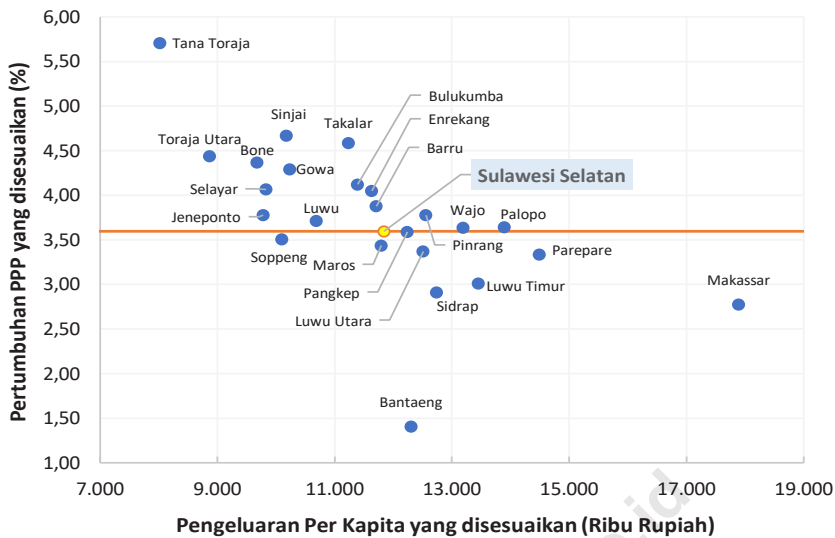
Gambar 4.5 Sebaran Kabupaten/Kota menurut Indikator pada Indeks Pendidikan (HLS dan RLS), 2023

Sumber : BRS IPM-BPS Prov. Sulsel, diolah

Capaian indeks pendidikan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan tahun 2023, yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), menunjukkan variasi yang substantial antar wilayah. Gambar 4.5 membagi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan ke dalam empat kelompok berdasarkan kedua indikator tersebut. Kelompok I, yang meliputi kota Makassar, Palopo, Parepare, serta kabupaten Enrekang, mencatatkan HLS dan RLS yang melebihi rata-rata provinsi. Keberadaan infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap, termasuk institusi pendidikan tinggi di kota-kota besar ini, mendukung peningkatan kesempatan pendidikan yang tercermin dalam angka HLS dan RLS. Kabupaten Enrekang, secara khusus, juga berhasil mencapai prestasi serupa dengan kota-kota besar, yang menandakan adanya upaya terfokus dalam pengembangan pendidikan di wilayah ini.

DiKelompokII,TanaToraja,Barru,danGowamemilikiHLSyanglebihtinggidiratarata Sulawesi Selatan, tetapi RLS mereka berada di bawah rata-rata. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penduduk di wilayah ini memiliki akses ke pendidikan dasar, namun masih terdapat tantangan yang mungkin dihadapi dalam mempertahankan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kabupaten Luwu Timur, yang berada di Kelompok III, memiliki RLS yang lebih tinggi namun HLS yang masih rendah, menandakan pendidikan wajib berhasil menjangkau sebagian besar penduduk namun transisi ke pendidikan yang lebih tinggi masih terbatas.

Kelompok IV mencakup 16 kabupaten dengan HLS dan RLS di bawah rata-rata Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa ada potensi yang signifikan untuk peningkatan dalam pendidikan, termasuk mengurangi angka putus sekolah dan mendorong kembali minat bersekolah.



Gambar 4.6 Sebaran Kabupaten/Kota menurut Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan dan Pertumbuhannya, 2023

Sumber : BRS IPM-BPS Prov. Sulsel, diolah

Standar hidup layak, yang digambarkan melalui pengeluaran perkapita disesuaikan, menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan. Kota-kota seperti Makassar, Parepare, dan Palopo, yang merupakan pusat ekonomi dan administratif, memimpin dengan angka pengeluaran per kapita yang tinggi. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri urban yang sering kali berkorelasi dengan peluang ekonomi yang lebih luas dan urbanisasi yang cenderung meningkatkan akses ke pekerjaan dan layanan sosial. Di sisi lain, kabupaten seperti Tana Toraja, Toraja Utara, dan Bone, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, memiliki angka absolut yang paling rendah dibandingkan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan.

Peningkatan pengeluaran per kapita di kabupaten Tana Toraja, Sinjai, dan Takalar dapat mengindikasikan perubahan positif dalam ekonomi lokal mereka, mencerminkan berbagai inisiatif dan kondisi yang mendukung peningkatan tersebut. Sementara itu, angka yang lebih rendah di kabupaten Maros dan Soppeng dibandingkan dengan rata-rata provinsi, menggambarkan keragaman ekonomi Sulawesi Selatan dan menegaskan bahwa setiap kabupaten memiliki dinamika ekonomi tersendiri.

<https://sulsel.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://sulsel.bps.go.id>



Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2023. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Agustus 2022. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Agustus 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Profil Kemiskinan di Sulawesi Selatan Maret 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sulawesi Selatan, Maret 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan Tahun 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

ST2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id

